

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Peran Pemimpin Pembangunan

Peran adalah tindakan yang dilakukan oleh aktor atau sekelompok yang sangat penting di lingkungannya dan dalam menyelesaikan suatu peristiwa tersebut merupakan perilaku yang diharapkan oleh pemerintah, swasta ataupun masyarakat (Iswanti & Zulkarnaini, 2022, hlm. 47). Definisi peran menurut Soekanto (2002, hlm. 242) “peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.”, seseorang dapat dikatakan menjalankan suatu peran apabila sudah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.

Pemimpin dibutuhkan untuk mengantur kinerja kelompok (Iriawan, 2022, hlm. 42). Lebih lanjut menurut Wasahua (2017, hlm. 87) kepemimpinan adalah kemauan untuk mempengaruhi orang dan sistem untuk memberikan dampak berguna bagi kelompok. Menurut Rasyid dalam Karsiman (2018, hlm.144) kepemimpinan yang tepat juga dapat mendukung pembangunan. Pembangunan pada dasarnya pencapaian kesejahteraan masyarakat dilalui dengan jalan perubahan-perubahan (Suarsih et al., 2017, hlm. 37). Kehidupan yang lebih baik sebelumnya, perubahan tersebut dilakukan melalui pembangunan, tujuan pembangunan masyarakat ialah perbaikan kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan masyarakat, sehingga kemiskinan dan lingkungan hidup masyarakat mengalami perubahan (Imtihan, H 2022, hlm.140).

Masyarakat sebagai objek pembangunan berarti masyarakat terkena langsung atas kebijakan dan kegiatan pembangunan. Dalam hal ini perlu ikut masyarakat dilibatkan baik dari segi formulasi kebijakan maupun aplikasi kebijakan tersebut, sebab merekalah yang dianggap lebih tahu kondisi lingkungannya (Widjajanti, 2020, hlm. 89). Peran pemimpin pembangunan sebagai pemimpin informal terlihat kongkrit ketika memberi nasihat, saran, dan pendapat serta bagaimana pemimpin pembangunan mengendalikan perilaku masyarakat.

Menurut Ife & Tesoriero (2016, hlm.558), pemimpin pembangunan memiliki peran penting dalam meningkatkan kapasitas masyarakat agar mereka mampu mengatur dirinya sendiri dan menentukan langkah apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki serta meningkatkan taraf hidupnya. Dengan kata lain, pemimpin pembangunan hadir bukan sekadar memberi bantuan sesaat, melainkan berusaha mendorong kemandirian dan keberdayaan masyarakat dalam jangka panjang. Jim Ife menjelaskan bahwa peran pemimpin pembangunan dapat dilihat melalui empat kategori utama yaitu:

a. Peran Fasilitatif (*facilitative roles*)

Peran fasilitatif (*facilitative roles*), yaitu upaya untuk membantu dan memberdayakan individu maupun kelompok agar dapat memanfaatkan potensi serta sumber daya yang dimilikinya. Tujuan akhirnya adalah agar pemimpin pembangunan mampu mengatasi permasalahan sendiri serta berkembang menjadi masyarakat yang lebih mandiri. Dalam praktiknya, peran pemimpin pembangunan ini mencakup sejumlah fungsi spesifik yaitu memfasilitasi masyarakat, mendorong dan membangun kapasitas masyarakat, mengidentifikasi masalah dan potensi masyarakat, memberikan dukungan dan mengelola dinamika sosial dan konflik.

b. Peran Edukatif (*educational roles*),

Peran edukasional (*educational roles*). Pada aspek ini, pemimpin pembangunan berfungsi sebagai pendidik yang berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi penting, sekaligus menumbuhkan pengetahuan baru. Peranan edukasional adalah peran yang bertugas dalam membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, mengonfrontasi, dan pelatihan. Peranan ini memiliki tujuan untuk pengenalan potensi dan peluang dalam pengembangan masyarakat.

c. Peran Perwakilan (*representational roles*),

Peran perwakilan (*representational roles*). Dalam peran ini, pemimpin pembangunan bertindak sebagai jembatan antara masyarakat dengan pihak luar. Pemimpin pembangunan akan bertanggung jawab dalam pencarian sumber daya advokasi, pemanfaatan media, menjalin hubungan dengan masyarakat, pengembangan jaringan kemitraan, dan membagikan pengalaman.

d. Peran Sosial Teknis (*socio-technical role*)

Peranan ini berlaku pada kemampuan *hard skill* yang dimiliki oleh seorang pemimpin pembangunan, seperti melakukan proses administrasi termasuk mengumpulkan, menyusun data, menganalisis data, mempresentasikan rangkuman data.

2.1.2 Gerakan Masyarakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), gerakan diartikan sebagai “usaha yang teratur di bidang sosial, politik, dan sebagainya untuk mencapai suatu tujuan,” sedangkan masyarakat didefinisikan sebagai “sekelompok orang yang hidup bersama di suatu tempat, saling berinteraksi, serta memiliki norma dan kebudayaan yang sama” (KBBI, 2024). Dengan demikian, gerakan masyarakat dapat dipahami sebagai usaha kolektif yang dilakukan secara teratur oleh kelompok masyarakat untuk mencapai tujuan bersama yang dianggap penting.

Menurut Cohe dalam Haris et al (2019, hlm. 18) menjelaskan bahwa gerakan sosial atau gerakan masyarakat yaitu gerakan yang dilakukan oleh sejumlah orang yang sifatnya terorganisir dengan tujuan untuk merubah atau mempertahankan sesuatu unsur tertentu dalam masyarakat yang luas. Sementara itu menurut McCarthy, Zald dalam Rahma, A (2023, hlm. 21) mendefinisikan gerakan sosial sebagai seperangkat pendapat dan keyakinan didalam kelompok yang mempresentasikan tuntunan perubahan yang bernilai sosial dibeberapa elemen dan struktur sosial.

Menurut Aribowo (2020, hlm. 54) gerakan masyarakat yaitu bentuk upaya yang sebenarnya dilaksanakan oleh sekelompok individu secara sistematis dengan tujuan membentuk terjadinya suatu transformasi dalam bentuk korelasi di dalam masyarakat. Sementara itu menurut Robert Minsel dalam Prasetya & Sugandi (2019, hlm, 78) menyatakan bahwa gerakan kemasyarakatan adalah seperangkat keyakinan dan tindakan yang tak terlembaga (*noninstitutionalised*) yang dilakukan sekelompok orang untuk memajukan atau menghalangi perubahan di dalam suatu

masyarakat. Tidak terlembaga mengandung arti mereka cenderung tidak diakui sebagai sesuatu yang berlaku umum secara luas dan sah di dalam suatu masyarakat.

Ciri-ciri gerakan masyarakat baru memiliki kesamaan dengan karakteristik gerakan masyarakat lama, yaitu adanya struktur organisasi yang jelas, dasar pemikiran atau alasan yang menjadi landasan gerakan, serta identitas yang dikenal oleh masyarakat luas. Gerakan masyarakat biasanya memiliki kepemimpinan yang mengarahkan, jaringan komunikasi yang memungkinkan penyebaran informasi, dan tujuan yang disepakati bersama.

a. Tipe Gerakan Masyarakat

Sebagai salah satu gejala sosial yang kerap kali muncul ditengah masyarakat dengan tujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan dilakukan oleh sekelompok orang secara terorganisir maka apabila dilihat dari perspektif sosiologi tentu gerakan masyarakat atau gerakan sosial ini dapat dibagi kedalam beberapa macam. Menurut Cohe dalam Haris et al (2019, hlm.17) gerakan masyarakat terbagi beberapa tipe yaitu:

- 1) Gerakan ekspresif. Dalam masyarakat yang sudah maju dan modern individu sering dijumpai mengungkapkan (mengekspresikan) berbagai keinginannya untuk mendapat perhatian dan simpati publik. Misalnya saja, gerakan yang dilakukan dikalangan kaum remaja dan pemuda dalam bentuk menciptakan model/gaya baru baik itu berupa cara berpakaian maupun penampilan yang dianggap unik orang lain.
- 2) Gerakan regresif. Adapun tipe gerakan sosial regresif sengaja dilakukan oleh sekelompok orang dengan tujuan untuk mengembalikan apa yang ada sekarang ini ke keadaan sebelumnya. Dengan kata lain mereka yang melakukan gerakan sosial regresif merasa kecewa serta frustrasi melihat keadaan sosial sekarang ini. Contohnya gerakan yang dilakukan dikalangan kelompok Ku Klux Klan yang menginginkan agar supaya hak sipil dan kebebasan kaum orang kulit hitam (*Black American*) ditempatkan pada status sosial yang lebih rendah.
- 3) Gerakan progresif. Bagi individu yang terlibat dalam gerakan ini pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan kelompok tertentu dalam masyarakat misalnya saja gerakan sosial yang dilakukan oleh serikat

pekerja dalam bentuk unjuk rasa dan protes menuntut kenaikan upah baik kaum buruh serta pekerja lainnya.

- 4) Gerakan reformis. Gerakan sosial ini lebih diorientasikan pada terciptanya perubahan dan pembaruan aspek tertentu dalam masyarakat. Contoh di Bulan Mei 1998 para mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia melakukan gerakan sosial dan menuntut diadakannya pembaharuan dan perubahan khususnya yang terkait dengan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme.
- 5) Gerakan revolusioner. Tidak seperti halnya gerakan reformasi, yang hanya menuntut dilakukannya perubahan terhadap aspek tertentu dalam masyarakat maka dalam gerakan sosial yang sifatnya revolusioner ini justru menuntut lebih jauh hingga dilakukan perubahan bersifat total dan radikal terhadap seluruh aspek kehidupan manusia dan tatanan sosial yang ada.
- 6) Gerakan utopian. Dalam konteks gerakan masyarakat ini yang mana dilakukan oleh sekelompok orang dengan tujuan untuk membentuk suatu lingkungan yang dianggap ideal dan baik bagi mereka. Salah satu contoh termasuk dalam gerakan sosial bersifat utopian yaitu gerakan yang dilakukan dikalangan kaum separatis yang ingin membentuk suatu Negara baru dengan cara memisahkan diri dari suatu negara.
- 7) Gerakan migrasi. Pada dasarnya gerakan ini mencakup individu yang merasa tidak begitu puas dengan kondisi kehidupan sosial ekonomi mereka sekarang sehingga memutuskan untuk berpindah kesuatu wilayah yang lain dengan harapan dapat memperoleh kehidupan sosial ekonomi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan keadaan sebelumnya.

b. Proses Terbentuknya Gerakan Masyarakat

Menurut Muzakar, A (2017, hlm. 97) mengidentifikasi 4 (empat) proses terbentuknya gerakan masyarakat atau gerakan sosial, yakni:

1) Incipient Stage

Pada situasi gerakan sosial haruslah ada tipe dari tekanan struktur atau kondisi yang tidak memuaskan dialami oleh individu. Kondisi yang tidak menyenangkan dan tidak teraihnya kebutuhan bisa disebabkan oleh suatu persoalan khusus, misalnya diskriminasi atau pengangguran. Kondisi ini mengarah pada situasi tidak

nyaman (Malaise), mengembangkan alienasi, massa menjadi gelisah dan mulai muncul kekerasan. Hal inilah yang menjadi karakteristik yang khas yang memungkinkan munculnya atau kesiapan untuk melakukan gerakan sosial.

2) *Popular Stage*

Pada tingkat selanjutnya berkembang sejumlah orang untuk saling mengenal dan membagi perasaan antara satu dari yang lain. Identifikasi dari gerakan akan meningkat secara cepat bila kondisi yang tidak menyenangkan bertambah. Pimpinan menjadi pemicu dramatisasi situasi dan meningkatkan jumlah pengikut gerakan. Aktivitas utama pada fase ini mencakup klarifikasi persoalan dan tujuan, serta memelihara aktivitas yang berbeda dari para anggota dengan memusatkan pada tujuan gerakan

3) *Organizational Stage*

Pada fase ini terjadi klarifikasi tujuan dan mobilisasi aksi. Kelompok formal dan organisasi yang lebih kompleks akan muncul. Selama periode ini muncul perilaku yang terstruktur, yakni: peran kepemimpinan terdefiniskan secara jelas, pemimpin formal muncul, tugas dikembangkan, kebijaksanaan khusus dan program kegiatan dibuat. Tujuan terbentuk dan strategi peningkatan mulai dilaksanakan. Akhirnya fraksi/ golongan akan berkembang, tergantung pada ukuran gerakan, dasar perbedaan opini tentang persoalan dan metode resolusi.

4) *Institutional Stage*

Fase terakhir ini muncul bila gerakan yang penuh kesuksesan di integrasikan dalam sejumlah struktur sosial dari masyarakat. Suatu saat situasi dikembangkan, sehingga gerakan sosial tidak lama lagi menjadi fenomena perilaku kolektif. Organisasi ini menjadi bagian dari organisasi sosial yang permanen dan lembaga yang terstruktur dari suatu masyarakat akhirnya muncullah lembaga tertentu yang mempunyai tendensi untuk ekspansi dan abadi. Kebanyakan organisasi sosial tidak sampai pada fase ini.

c. Relevansi Gerakan Masyarakat untuk Pembangunan Desa

Salah satu faktor penting yang membuat gerakan masyarakat atau gerakan sosial lebih terstruktur adalah keberadaan jaringan komunikasi yang sudah terbentuk dengan baik, adanya anggota yang memiliki kemampuan kepemimpinan, serta

keterlibatan anggota kelompok dalam berbagai kegiatan. Di dalam gerakan masyarakat biasanya sudah ada pemimpin, anggota yang aktif, tempat untuk berkumpul, agenda kegiatan rutin, rantai sosial yang menghubungkan para anggota, serta kesamaan nilai, simbol, dan bahasa yang memperkuat identitas.

Seorang pemimpin dalam suatu kelompok gerakan masyarakat harus memusatkan perhatiannya kepada masalah mobilisasi, hal-hal yang membuat ketidakpuasan, pilihan taktis, dan infrastruktur masyarakat dan gerakan yang diperlukan agar suatu gerakan sosial berhasil. Menurut Morris, Staggenborg dalam Sukmana, O (2013, hlm. 44) para pemimpin (*leaders*) sangat penting dalam gerakan sosial, mereka menginspirasi komitmen, memobilisasi sumber-sumber, menciptakan dan memahami kesempatan-kesempatan, menyusun strategi, membimbing tuntutan-tuntutan, dan mempengaruhi hasil-hasil. Pemimpin gerakan (*leadersmovement*) didefinisikan sebagai pembuat keputusan strategis (*strategic decision-makers*) yang menginspirasi dan mengorganisasi orang lain untuk berpartisipasi dalam gerakan masyarakat.

Gerakan masyarakat memiliki posisi strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan desa. Pembangunan desa tidak dapat hanya mengandalkan intervensi pemerintah secara *top-down*, tetapi memerlukan keterlibatan aktif masyarakat sebagai subjek pembangunan. Menurut Adisasmita dalam Endah, K (2019, hlm. 54) pembangunan desa dilakukan dengan pendekatan secara multisektoral (*holistic*), partisipatif, berlandaskan pada semangat kemandirian, berwawasan lingkungan serta melaksanakan pemanfaatan sumber daya pembangunan secara serasi dan selaras bersinergi sehingga tercapai optimalitas.

Keterlibatan masyarakat melalui gerakan masyarakat berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi. Hal ini memastikan program pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, gerakan masyarakat dapat menjadi wadah untuk memobilisasi sumber daya lokal, baik sumber daya manusia, alam, maupun finansial, sehingga potensi desa dapat dimanfaatkan secara optimal (Kahar, S 2018, hlm. 17).

Selain itu, gerakan masyarakat memperkuat modal sosial (*social capital*) yang mencakup jaringan sosial, kepercayaan, norma gotong royong, serta identitas

kolektif yang menjadi perekat kehidupan sosial desa (Sedana, G et al., 2014, hlm. 11). Modal sosial inilah yang memudahkan proses mobilisasi sumber daya, memperlancar komunikasi, serta mengurangi biaya koordinasi dalam pelaksanaan program. Dengan kata lain, gerakan masyarakat bukan hanya instrumen penggerak pembangunan, tetapi juga fondasi yang menjamin keberlanjutan hasil pembangunan karena masyarakat merasa memiliki dan berkepentingan untuk memelihara hasilnya.

2.1.3 Sadar Pajak

Sadar pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak telah mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Menurut Erly Suandy dalam Wahyudi, A, T (2019) pengertian kesadaran wajib pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutang. Sedangkan menurut Rahayu, K (2010, hlm. 141) pengertian kesadaran wajib pajak adalah kesadaran memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut metode pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan pelayanan kepada wajib pajak selaku pihak pemberi dana bagi negara.

Kesadaran wajib pajak yaitu dimana seseorang mengerti atau memahami akan hak dan kewajiban yang harus dilakukannya (Alfina, Z & Diana, N., 2021). Kesadaran perpajakan merupakan suatu hal yang dirasakan atau dialami dalam menyadari hal baik atau buruk dalam kewajiban perpajakan, termasuk rela memberikan kontribusi untuk melaksanakan dalam membayar pajak (Andaningsih et al., 2022, hlm. 71).

Kesadaran adalah hal yang dirasakan wajib pajak mengenai kewajibannya dalam memberikan kontribusi dana dengan cara membayar pajak tanpa adanya paksaan. Kesadaran merupakan suatu hal yang dirasakan atau dialami dalam menyadari hal baik atau buruk dalam kewajiban perpajakan termasuk rela memberikan kontribusi

untuk melaksanakan dalam membayar pajak (Andaningsih et al., 2022, hlm. 52). Kesadaran wajib pajak adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar pajaknya (Mumu et al., 2020, hlm. 74). Secara konsisten menurut Abdullah et al (2022, hlm. 54) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB (Pajak Bumi dan Bngunan. Akan tetapi, (Maharaja et al, 202, hlm. 55) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Kesadaran Pajak berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diantaranya adalah:

- a. Sebagai orang yang memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan wajib pajak memiliki kewajiban dalam membayar pajak atas objek yang merekam, memiliki atau memanfaatkan.
- b. Wajib pajak sadar bahwa pajak merupakan sumber pendapatan daerah, jadi sebagai warga negara yang merupakan bagian dari sebuah daerah kesadaran membayar pajak juga dapat diartikan kesadaran untuk turut serta dalam pembangunan daerah.

Wajib Pajak yang memiliki kesadaran tinggi tidak menganggap membayar pajak merupakan suatu beban namun mereka menganggap hal ini adalah suatu kewajiban dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara sehingga mereka tidak keberatan dan membayar pajaknya dengan sukarela. Hal ini terjadi karena mereka memiliki pandangan bahwa membayar pajak merupakan salah satu cara untuk berpartisipasi dalam pembangunan melalui pajak sehingga mendukung kebijakan pajak oleh pemerintah.

Kesadaran wajib pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi terhadap pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan penyuluhan perpajakan secara intensif dan kontinyu akan meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai

wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional (Rahayu dalam Nafiah, Z, Warno, W 2018, hlm. 37).

a. Faktor Faktor Rendahnya Kesadaran Pajak

Menurut (Wati et al., 2022) Faktor ada 4 faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak PBB-P2 yaitu: (a) kurangnya informasi dari pihak pemerintah kepada rakyat/wajib pajak, (b) adanya kebocoran didalam penarikan pajak, (c) suasana individu (belum memiliki uang) serta adanya upaya yang dilakukan oleh pihak kecamatan untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat membayar PBB-P2, (d) adanya kesalahan teknis yang menghambat kesadaran untuk membayar PBB-P2.

b. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah sebagai berikut:

“Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang dimaksud bumi pada penjelasan definisi di atas adalah sebagai berikut: “Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten atau Kota”. Sedangkan definisi bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut: “Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan pedalaman dan atau laut.

Jadi dapat disimpulkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Menurut Waluyo dalam Abdullah et al, (2022) Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek pajak yaitu bumi dan

bangunan, keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.

2.1.4 Difusi Inovasi Program MAPAIS (Mayar Pajak Pake Pisang)

Menurut Rogers, E (1995, hlm. 20) dalam bukunya *Diffusion of Inovations* mengistilahkan difusi inovasi adalah suatu usaha untuk menyebarluaskan gagasan baru kepada anggota masyarakat dalam suatu sistem sosial tertentu dengan kurun waktu dan saluran tertentu. Adapun unsur difusi inovasi yakni: (1) sumber adalah agen perubah yang membuat atau menyampaikan gagasan inovasi; (2) inovasi mengacu pada suatu gagasan/ide yang dianggap baru oleh anggota masyarakat yang memiliki sifat keuntungan relatif, kompatibilitas, kompleksitas, triatibilitas dan observabilitas; (3) saluran komunikasi yakni alat atau media yang digunakan untuk menyampaikan pesan inovasi inovasi yang terdiri dari saluran komunikasi personal, saluran media massa, saluran komunikasi personal, saluran media massa, saluran komunikasi lokal dan saluran kosmopolit; (4) penerima inovasi sebagai anggota sistem sosial dengan berbagai karakteristik.

Secara prinsip, menurut Rogers, E (1995, hlm. 17) dalam bukunya *Diffusion of Innovations* proses difusi inovasi terdiri dari 3 tahapan inti yakni: (1) tahap pengenalan ada inovasi baru; (2) tahapan meyakinkan yakni usaha menciptakan pengalaman rasa positif dari calon adopter terkait gagasan inovasi; (3) tahap keputusan dimana mengacu pada usaha untuk mengarahkan penerima inovasi untuk memutuskan apakah menerima atau menolak inovasi tersebut.

Hal tersebut terbukti dalam program MAPAIS (Mayar Pajak Pake Pisang) merupakan inovasi program yang berbasis potensi lokal, muncul dari kesadaran pemimpin pembangunan untuk mengatasi rendahnya tingkat kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Program ini memanfaatkan komoditas pisang sebagai media pembayaran pajak. Hal ini sejalan dengan konsep inovasi pelayanan publik yang dijelaskan Nurrizqy et al. (2024) pelayanan publik diartikan, pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Menurut Sedarmayanti, (2018, hlm 45), inovasi berbasis potensi lokal sangat efektif diterapkan karena dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat serta menumbuhkan rasa memiliki terhadap program. Dalam program MAPAIS tidak hanya memudahkan pembayaran pajak, tetapi juga mendorong pengelolaan hasil pertanian menjadi lebih produktif. Tujuan dari Program MAPAIS adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dengan cara yang kreatif dan mudah diterima. Program MAPAIS bertujuan agar masyarakat memahami pentingnya pajak dalam pembangunan desa dan merasakan manfaat nyata. Selain itu, program MAPAIS juga berupaya mengubah persepsi pajak dari sekadar kewajiban menjadi membangun kepercayaan masyarakat terhadap transparansi penggunaan pajak.

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Dalam penelitian ini, penulis melakukan tinjauan dari beberapa jurnal penelitian ataupun skripsi yang memiliki hubungan dengan judul dan topik penelitian yang penulis lakukan. Hal ini bertujuan untuk menghindari duplikasi. Berikut adalah penelitian yang penulis kaji sesuai dengan masalah dan topik pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Penelitian yang disusun oleh Siti Gina Nuriasilva, Universitas Ibn Khaldun Bogor Tahun 2024. Penelitian ini berfokus pada pendidikan dan kesadaran wajib pajak terhadap pajak bumi dan bangunan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Sampel penelitian terdiri dari 96 wajib pajak di Desa Pasirtanjung yang dipilih secara acak. Data yang dikumpulkan adalah data kuantitatif berupa skor atau peringkat tanggapan dari kuesioner. Informasi primer dikumpulkan melalui interaksi langsung, seperti wawancara, survei, dan analisis statistik. Analisis data menggunakan pengujian hipotesis, analisis regresi berganda, dan pengujian hipotesis standar. Hasil riset menunjukkan adanya hubungan positif antara kesadaran wajib pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak di Desa Pasirtanjung. Secara spesifik, semakin tingginya kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban membayar PBB, semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak. Demikian pula, pengetahuan masyarakat, khususnya wajib pajak, juga memiliki dampak positif terhadap kepatuhan mereka terhadap hukum perpajakan. Semakin

tinggi pemahaman masyarakat tentang perpajakan, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak Desa Pasirtanjung.

Penelitian yang disusun oleh Destina Zai, Hurian Kamela, Prodi Akuntansi Keuangan Publik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Terbuka Tahun 2025. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Tujuan penelitian (1) untuk menganalisis kesadaran, kepatuhan dan pembayaran pajak di lingkup Desa Sihene'asi, (2) untuk menganalisis pengetahuan masyarakat mengenai pengetahuan masyarakat tentang pengetahuan PBB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesadaran (WP) dan Kepatuhan (WP) berpengaruh terhadap pembayaran PBB di Desa Sihene'asi Kecamatan Lahewa, sehingga masyarakat sudah cukup mengetahui dalam pembayaran pajak, penerapan untuk pembayaran pajak sudah dijalankan oleh masyarakat, hal ini berarti bukan menjadi hambatan dalam pengembangan untuk kemajuan wilayah setempat.

Penelitian yang disusun oleh Raul Sebastian dan Khusnul Khotimah, Universitas Islam Jember, Indonesia Tahun 2024. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Peneliti mengawali penelitian ini dengan cara observasi, kemudian dilanjut wawancara dan didukung dengan dokumentasi. Untuk menentukan informan, peneliti menggunakan purposive sampling dan didapatkan 5 orang informan yaitu 3 *key* informan dan 2 *support* informan. Hasil dari penelitian ini yakni peran dari pemerintah desa untuk menyikapi masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya wajib pajak di Kelurahan Jemberlor hadir untuk menyadarkan masyarakat membayar pajak, memberikan pembinaan dan sekaligus bisa mengevaluasi pendapatan pajak.

Penelitian yang disusun oleh Galih Nugraheni dan Heri Roh Pujiat, Universitas Gunung Kidul 2025. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor penyebab rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator penting kemandirian fiskal suatu daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaktertiban wajib pajak membayar PBB bukan hanya karena faktor ekonomi, melainkan lebih pada aspek kesadaran, kebiasaan, serta komunikasi yang belum efektif. Minimnya kesadaran wajib pajak membayar

tagihan perlu diatasi dengan pendekatan yang lebih humanis dan edukatif oleh pemerintah. Dalam konteks ini, sosialisasi program SIPAPAH secara intensif menjadi strategi penting membangun kepercayaan publik serta menumbuhkan kesadaran kolektif terhadap kewajiban perpajakan.

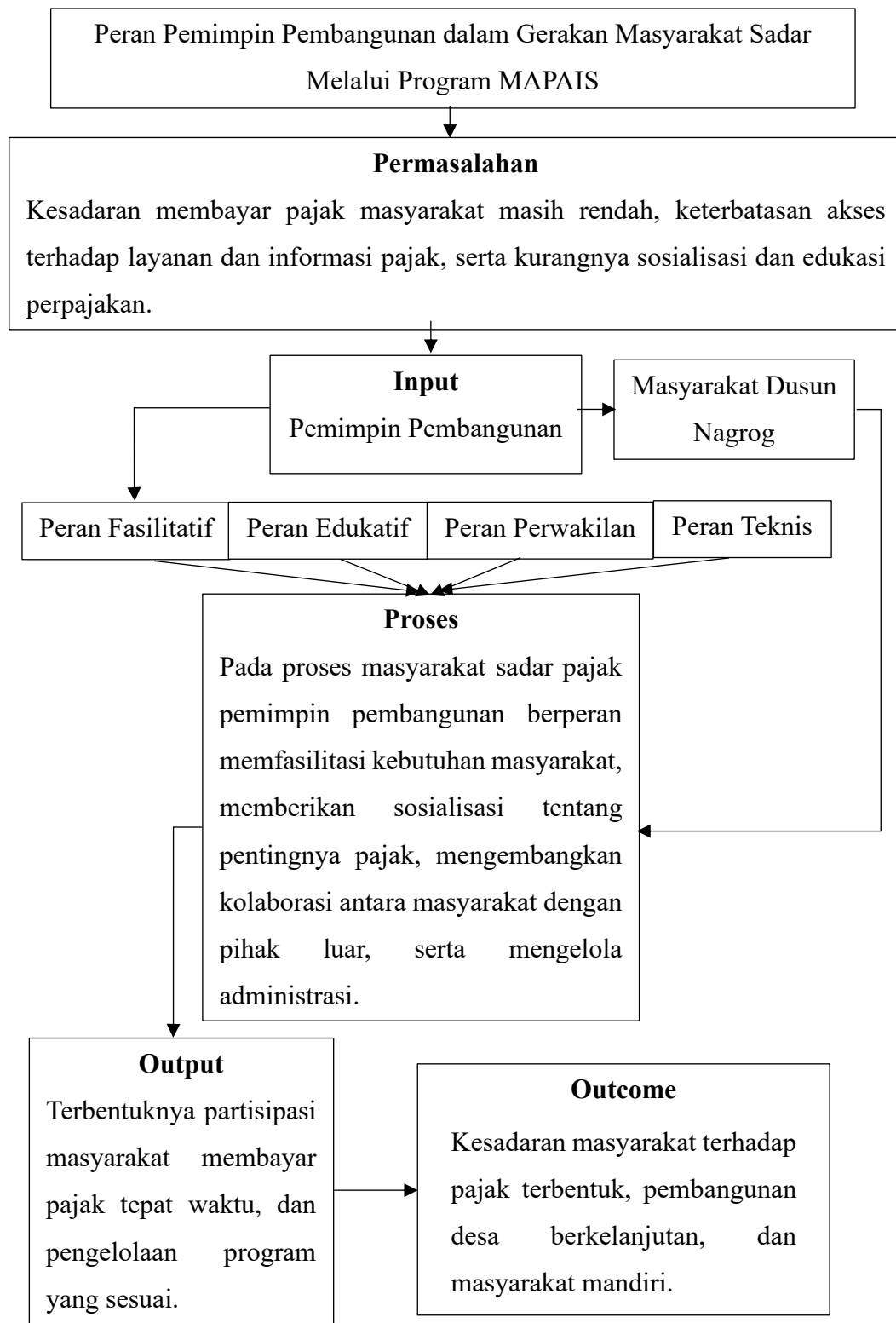
Penelitian yang disusun oleh Rien Hardani Alfian, Program Studi Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong Tahun 2023. Metode Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan fokus pada wawancara mendalam kepada pengelola inovasi pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), wajib pajak pengguna pajak elektronik dan wajib pajak yang belum menggunakan pajak elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melalui Channel Pembayaran Pajak Elektronik (CANTIK) sudah dikategorikan dengan Baik untuk meningkatkan pelayanan pajak kepada wajib pajak yang ada di Kabupaten Tabalong.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menurut Miles dan Huberman (dalam Guntur, 2019) adalah suatu konsep yang sangat penting dalam menentukan pemisahan data yang diinginkan dan tidak diinginkan. Selain itu, kerangka konseptual juga digunakan untuk mengembangkan suatu teori (Guntur, 2019). Terdapat beberapa manfaat dengan adanya kerangka konseptual diantaranya adalah

- a. Mempermudah penyusunan hipotesis serta memiliki fokus dari minat penelitian yang layak untuk diuji,
- b. Memudahkan untuk mengidentifikasi variabel penelitian.

Lester (dalam Guntur, 2019) menyebutkan bahwa kerangka konseptual disusun berdasarkan konsep tertentu dan bermakna untuk mengantisipasi bagaimana konsep-konsep berhubungan satu sama lain. Sejalan dengan pendapat Lester, Imenda (dalam Guntur, 2019) menyebutkan bahwa kerangka konseptual merupakan tujuan, fokus, dan inti dasar setiap penelitian. Secara ringkas kerangka Konseptual penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

Sumber: Adaptasi dari buku *Community Development* karya Ife dan Tesoriero (2016)

Dari Gambar 2.1 di atas dijelaskan bahwa penelitian ini disusun untuk menjelaskan keterkaitan antara peran pemimpin pembangunan dengan terbentuknya gerakan masyarakat sadar pajak melalui pelaksanaan program MAPAIS (Mayar Pajak Pake Pisang) di Dusun Nagrog, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis. Peneliti menemukan permasalahan diantaranya adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), keterbatasan akses terhadap layanan dan informasi perpajakan, serta minimnya kegiatan sosialisasi dan edukasi pajak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa diperlukan adanya peran pemimpin pembangunan yang memiliki kemampuan untuk menggerakkan, memfasilitasi, dan mengedukasi masyarakat agar timbul kesadaran dalam memenuhi kewajiban pajak.

Pemimpin pembangunan berperan sebagai penggerak utama dalam meningkatkan kesadaran pajak masyarakat melalui empat dimensi peran sebagaimana dikemukakan oleh Ife dan Tesoriero (2016), yaitu fasilitatif, edukatif, perwakilan, dan teknis. Melalui peran fasilitatif, pemimpin pembangunan memfasilitasi kebutuhan masyarakat. Pada peran edukatif, pemimpin pembangunan memberikan pemahaman tentang pentingnya pajak bagi pembangunan desa. Peran perwakilan diwujudkan melalui kemampuan menjembatani masyarakat dengan pihak eksternal seperti pemerintah. Sementara peran teknis tampak dalam pengelolaan administrasi. Proses ini menghasilkan *output* berupa meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak tepat waktu serta pengelolaan program yang lebih transparan. *Outcome* yang diharapkan adalah terbentuknya kesadaran pajak, meningkatnya tanggung jawab sosial, dan terwujudnya pembangunan desa yang mandiri dan berkelanjutan.